

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di Dunia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki batas-batas langsung dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Indonesia memiliki batas darat dan batas laut langsung dengan Malaysia. Hingga pada akhirnya Indonesia memiliki berbagai macam masalah dengan negara tetangga, khususnya masalah perbatasan. Seperti masalah klaim sepihak, pelanggaran batas wilayah, ataupun ancaman-ancaman dari luar yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai akses masuknya ancaman tersebut.

Indonesia dan Malaysia memiliki masalah terkait masalah batas darat, tepatnya batas darat di pulau Kalimantan bagian barat. Masalah tersebut berada di Dusun Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh, Desa Temajuk, Kalimantan Barat. Camar Bulan dipermasalahkan oleh pihak Indonesia pasca demarkasi batas darat dan penandatanganan MoU tahun 1978 di Semarang. Hal ini terjadi karena pihak Indonesia tidak memiliki kesepakatan dengan pihak Malaysia. Maksudnya pada saat demarkasi batas darat di Kalimantan Barat, kedua negara memiliki perbedaan penafsiran mengenai traktat atau konvensi Inggris dan Belanda tahun 1891, 1915 dan 1928. Inggris dan Belanda telah melakukan perjanjian sebelumnya untuk menentukan batas wilayah kolonialnya, namun hal tersebut bukan menjadi hal yang mudah untuk Indonesia dan Malaysia dalam menafsirkan konvensi Inggris dan Belanda tersebut.

Maka dari itu terjadi kesalahan dalam penetapan batas darat di wilayah Camar Bulan, sehingga Indonesia terancam kehilangan 1499 Ha di wilayah Camar Bulan. Namun karena Indonesia telah sepakat untuk menggunakan metode *watershed* pada saat demarkasi batas darat, dan juga Indonesia telah menandatangani MoU pasca demarkasi, Indonesia harus menerima kelalaiannya dalam menjaga wilayah perbatasan. Apabila Indonesia memahami lebih dalam

lagi mengenai traktat Inggris dan Belanda tahun 1891, 1915 dan 1928, kecil kemungkinannya Indonesia kehilangan 1499 Ha di wilayah Camar Bulan.

Wilayah Camar Bulan merupakan wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berstatus *Outstanding Boundary Problems*, namun pihak Malaysia menganggap wilayah Camar Bulan merupakan wilayah yang telah disepakati bersama sejak tahun 1978 di Semarang. Karena apabila pihak Malaysia menganggap Camar Bulan sebagai wilayah yang dikategorikan *Outstanding Boundary Problems*, maka Malaysia akan mengalami kerugian yang sangat besar, karena sejak tahun 1989-an pihak Malaysia telah melakukan pembangunan infrastruktur serta menjadikan Camar Bulan sebagai taman negara.

Dalam hal ini Camar Bulan memiliki potensi alam yang sangat bagus, terutama untuk pariwisata. Camar Bulan memiliki ketertarikan tersendiri, yang membuat para investor maupun wisatawan tertarik untuk mengunjungi wilayah Camar Bulan. Hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa Indonesia begitu menyayangkan apabila Camar Bulan lepas ketangan Malaysia, selain Indonesia ingin menjaga kedaulatannya. Keindahan alam yang terdapat di wilayah Camar Bulan dapat dijadikan sebagai objek wisata dan pendapatan untuk pihak pengelolanya.

Indonesia beranggapan bahwa kepemilikan Malaysia terhadap wilayah Camar Bulan merupakan sebuah ancaman, dan juga Indonesia menganggap Malaysia telah merebut kedaulatan dari pada Indonesia. Padahal pihak Indonesia sendiri yang secara tidak langsung telah melepas wilayah kedaulatannya di Kalimantan Barat. Hal tersebut karena kurangnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola wilayah perbatasan, sehingga masyarakat serta kondisi di wilayah perbatasan serba kekurangan. Contohnya seperti kurangnya sarana dan prasarana di wilayah perbatasan.

Apabila masyarakat perbatasan Indonesia lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya di Malaysia, bukanlah kesalahan dari masyarakat perbatasan atau bukan kurangnya rasa nasionalisme masyarakat perbatasan, melainkan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal itu menjadi sebuah ancaman lainnya untuk Indonesia karena masyarakat perbatasan yang akan memilih pihak lain dari pada negaranya sendiri karena kurangnya perhatian.

Melihat ancaman yang ada untuk pihak Indonesia terkait masalah masyarakat perbatasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak untuk melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan khususnya untuk berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan sekolah gratis, layanan kesehatan dan lainnya. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia agar kesalahan yang telah dilakukan tidak terulang kembali dan tidak memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia.

Dalam masalah perbatasan di Dusun Camar Bulan ini kedua negara berupaya untuk membicarakan masalah tersebut kedalam sebuah pertemuan yang dilaksanakan sejak tahun 2001, namun pertemuan kedua negara terhenti pasca tahun 2002 dan kembali dilaksanakan pada tahun 2011. Pertemuan tersebut dinamakan *Joint Indonesia-Malaysia (JIM)* atau *Joint Statement* yang dimana saat melakukan pertemuan kedua negara membahas mengenai teknis dalam penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Terkait dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Indonesia dalam mempertahankan wilayah Camar Bulan agar tetap menjadi bagian dari NKRI, pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang mengarahkan masyarakat maupun pasukan Indonesia untuk tidak melakukan kekerasan atau penyerangan terhadap Malaysia. Karena kedua pihak yaitu Indonesia dan Malaysia masih didalam perundingan terkait masalah perbatasan, dan juga kedua negara masih dalam hubungan baik. Tetapi kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak memprovokasi hubungan Indonesia dan Malaysia, terdapat peran media ataupun politisi yang membangkitkan semangat nasionalis untuk segera menyelesaikan masalah Camar Bulan ini.

Maka dari itu terbentuklah sebuah kegiatan-kegiatan anarkis dari masyarakat Indonesia yang menekan pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan para demonstran ini dilakukan karena masyarakat Indonesia yang telah terprovokasi oleh media dan politisi untuk memusuhi Malaysia, karena Malaysia dianggap telah melakukan pencaplokan wilayah Indonesia.

Akan tetapi pihak Malaysia tidak diam saja menyikapi hal tersebut, pihak Malaysia mengembalikan pernyataan yang dinyatakan oleh pihak Indonesia. MoU

1978 di Semarang merupakan penguat Malaysia dalam masalah ini. Apabila Indonesia menyatakan Malaysia melakukan banyak pelanggaran di wilayah perbatasan, Malaysia akan membuktikannya melalui perundingan-perundingan yang akan dilakukan selanjutnya. Dan juga pihak Malaysia menantang pihak Indonesia agar berunding di wilayah yang bermasalah, agar masalah segera terselesaikan.

Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa masalah perbatasan di Kalimantan Barat khususnya di Camar Bulan sampai saat ini belum terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan kurang intensifnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia dalam membicarakan masalah perbatasan tersebut. Namun kedua negara telah mengupayakan agar masalah Camar Bulan ini segera selesai tanpa adanya peperangan, seperti pembentukan kepanitiaan dalam penegasan tapal batas di wilayah Camar Bulan. Selain itu, masing-masing negara juga melakukan upaya pembangunan infrastruktur agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan kedua negara mendapatkan kepentingan nasionalnya.

IV.2 Saran

Untuk mempertahankan kedaulatan Camar Bulan sebagai bagian dari NKRI, maka pemerintah Indonesia melakukan tindakan atau penanganan lebih lanjut, contohnya seperti : *Pertama*, perlu adanya pembangunan infrastruktur di wilayah Camar Bulan, mengembangkan program kesenjangan, maksudnya untuk mempermudah masyarakat perbatasan dalam mendapatkan kebutuhannya seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya. *Kedua*, perlu mengintensifkan kembali hubungan antara Indonesia dan Malaysia guna memperjelas masalah Camar Bulan ini dan pihak Malaysia mengerti akan konvensi Inggris dan Belanda tahun 1891, 1915 dan 1928 yang telah disepakati sebelumnya. *Ketiga*, menghindari tindakan-tindakan yang anarkis yang dapat memicu terjadinya perang. *Keempat*, perlu adanya program dari pemerintah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kedaulatan Indonesia, maksudnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dari masyarakat perbatasan.

Beberapa saran tersebut diharapkan dapat dijadikan ide-ide baru terhadap masalah perbatasan di Camar Bulan ini. Hal ini agar wilayah perbatasan tidak lagi

dilihat sebagai ruang demarkatif, melainkan sebagai ruang antarmuka internasional. Karena negara-negara tetangga akan menilai Indonesia dari wilayah perbatasan tersebut. Selain itu juga agar wilayah perbatasan tidak diklaim sepihak karena kurangnya perhatian dari pemerintah pusat. Dan juga untuk menjaga kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

